

Judul : Partai Ingatkan Caleg Terpilih Berkerja untuk Rakyat
Tanggal : Jumat, 03 Mei 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Partai Ingatkan Caleg Terpilih Bekerja untuk Rakyat

[JAKARTA] Partai politik berkomitmen mengingatkan para kader yang terpilih sebagai anggota DPR agar benar-benar bekerja untuk rakyat. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2019 harus menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di Partai Demokrat ada pakta integritas yang menjadi rambu utama bagi kader yang dipercaya rakyat mengabdikan di legislatif maupun eksekutif," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan kepada *SP* di Jakarta, Jumat (3/5).

Hinca menyatakan, salah satu isi pakta integritas adalah komitmen terhadap gerakan antikorupsi. Apabila ada pelanggaran, menurut Hinca, kader yang bersangkutan akan dipecat.

Hinca juga menyatakan partai tak bisa terlalu jauh mengatur anggotanya di DPR. "Wakil rakyat itu berdaulat penuh, karena dipilih langsung oleh rakyat. Titik utamanya ada pada anggota DPR itu sendiri, sedangkan partai hanya memberikan arahan sikap politik yang dijalankan di DPR," ucap Hinca.

Hinca optimistis DPR periode 2019-2024 akan membawa harapan baru bagi. "Harapan menghadirkan DPR yang bekerja sesuai konstitusi itu selalu ada. Mari kita menantikan kinerja mereka. Tak hanya itu, kerja-kerja DPR harus didukung setiap elemen bangsa," katanya.

Namun, dia mengakui fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, lebih menonjol dibanding fungsi legislasi. Hal tersebut, menurut bukan tanpa sebab. Fungsi legislasi itu juga bergantung juga kecekatan pemerintah dalam kesetaraan energi dan sikap saat membahas substansi rancangan undang-undang.

"Undang-undang itu dibahas dan diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah. Jadi tidak hanya DPR saja. Tanpa niat tulus pemerintah, maka fungsi legislasi DPR jelas pincang dan tidak efektif," ujarnya.

Lebih Baik

Senada dengannya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG bidang

Media dan Penggalangan Opini Tb Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Jumat (3/5), menyatakan pihaknya meyakini kinerja DPR periode 2019-2024 akan lebih baik dibanding periode 2014-2019. DPR periode baru lima tahun ke depan pasti akan belajar dari DPR periode sekarang.

"Tidak mungkin sama dengan yang sekarang. Nanti *kan* bisa belajar dari pengalaman sekarang," katanya.

Ia menjelaskan DPR lima tahun ke depan pasti akan berkepentingan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya jika sama seperti sekarang atau lebih buruk dari sekarang, bisa dihukum oleh masyarakat pada pemilu berikutnya.

"Partai tentu punya harapan agar pada pemilu berikutnya dipercaya lagi masyarakat. Dalam konteks ini, kinerja di parlemen pasti didorong untuk berubah supaya mendapat kepercayaan lagi," tutur wakil ketua Komisi VIII DPR ini.

Saat ditanya tentang pernyataan sejumlah kalangan yang pesimistis akan ada perubahan kinerja karena semua partai yang lolos ke parlemen adalah partai lama, Ace menyebutkan partai politik yang lolos ke Senayan membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan caleg yang diusung. Apabila masyarakat tidak percaya, tidak mungkin sembilan dari 10 partai lama bisa kembali lolos.

"Hasil yang ada sekarang menunjukkan masyarakat masih percaya pada partai-partai lama. Jadi sikap pesimistis terhadap kinerja partai lama mestinya tidak perlu karena buktinya masyarakat masih percaya. Buktinya dipilih saat pemilu. Nah, tinggal bagaimana nanti partai-partai lama ini menjawab kepercayaan masyarakat itu dalam lima tahun ke depan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dia menegaskan partai lama tidak mungkin mengabaikan begitu saja kepercayaan yang sudah diberikan rakyat. Partai lama yang lolos parlemen pasti akan berbuat lebih baik sehingga pada pemilu berikutnya tidak ditinggalkan masyarakat dan memilih partai baru.

Pesimisme kinerja DPR menda-tang tak akan lebih baik daripada saat ini disampaikan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono.



Hasil Hitung Cepat Pileg 2019 5 Lembaga Survei (%)

Partai	Indo barometer	Indikator	SMRC	Charta Politika	Cyrus Network
PDI-P	19,49	18,92	19,43	19,94	19,76
Partai Gerindra	13,37	12,66	12,62	12,39	12,05
Partai Golkar	11,64	11,84	12,14	11,46	12,65
PKB	8,97	10,13	9,56	9,67	9,63
Partai Nasdem	7,84	9,04	8,86	8,19	8,74
PKS	9,66	8,18	8,19	8,54	8,37
Partai Demokrat	7,63	7,61	7,55	7,75	7,33
PAN	6,83	6,54	6,63	6,91	6,43
PPP	4,40	4,39	4,52	4,74	4,80
Perindo	2,67	2,68	2,85	2,76	2,83
Partai Berkarya	2,12	2,37	2,18	2,02	2,19
PSI	2,07	2,03	1,94	2,05	1,92
Partai Hanura	1,64	1,75	1,72	1,80	1,61
PBB	0,84	0,95	0,88	1,00	0,92
Partai Garuda	0,57	0,62	0,62	0,53	0,56
PKPI	0,27	0,28	0,32	0,27	0,26

Foto: ANTARA

PBB adalah salah satu parpol yang kemungkinan tak bisa mengirim wakil ke DPR.

“Saya prediksi DPR mendatang tidak akan lebih progresif dari DPR periode 2014-2019. Masih terbuka peluang DPR mendatang terjerat kasus korupsi. Pasaunya, sistem pemilu yang mahal dan para caleg telah mengeluarkan banyak duit untuk mendapatkan suara,” katanya.

Sukmo meminta DPR mendatang meningkatkan kualitas pengawasan yang merupakan bagian *checks and balances*. “Yang paling penting, tidak boleh ada kongkalikong antara yang mengawasi dan diawasi,” katanya.

Hal yang sama disampaikan

peneliti LIPI, Syarief Hidayat. Masih dominannya wajah lama yang terpilih lagi menjadi anggota DPR diperkirakan akan membuat kinerja lembaga tersebut lima tahun ke depan tidak akan banyak berubah. Salah satu persoalan mendasar yang menyebabkan buruknya kinerja DPR terkait dengan terminologi “*vote minus voice*”. Maksudnya, secara umum Indonesia telah cukup berhasil dalam memproduksi *vote* (penggunaan hak pilih) melalui partisipasi yang tinggi dalam setiap pemilihan umum (pemilu). Namun, *vote* yang telah dituai melalui pemilu tersebut sangat mustahil menghasilkan *voice* (perwujudan aspirasi dan janji)

setelah pemilu karena lemahnya peran lembaga representative dan tidak bekerjanya fungsi partai politik.

Implikasinya, *vote* yang diamanahkan oleh masyarakat pada pemilu tidak banyak berdampak pada perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pascapemilu.

“Secara implisit, reformasi politik sejauh ini baru sampai pada upaya menghadirkan lembaga demokrasi, tetapi penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki agar dapat menjalankan fungsi institusi, relatif kurang mendapat perhatian serius,” kata Syarief Hidayat.

[YUS/C-6/R-14/H-14]